



Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan X

Dinda Ivana Arista¹, Selamat Eko Budi Santoso^{2*}, Nur Isna Inayati^{3*}



Affiliation:

^{1,2,3} Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*Correspondence:

budi.imm@gmail.com
nurisnainayati@ump.ac.id

ABSTRAK

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan X tahun 2021-2023 yang diukur dari indikator ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Laporan ini dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Kecamatan X. Metode analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pengukuran value for money dan rasio keuangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kantor Kecamatan X sudah cukup ekonomis, efisien, dan efektif yang dimana setiap perbandingan menghasilkan nilai rasio yang cukup baik. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan Kantor Kecamatan X mampu mengelola anggaran secara tepat dan telah menjalankan setiap program kegiatan yang sudah ditentukan.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Value for Money, Rasio Keuangan

ABSTRACT

This report aims to determine the financial performance of the X District Office in 2021-2023 as measured by economic, efficiency and effectiveness indicators. This report was carried out by analyzing financial performance through the X District Office's Budget Realization Report (LRA). The data analysis method uses descriptive quantitative with measurement of value for money and financial ratios. Based on the research results, it shows that the financial performance of the X District Office is quite economical, efficient and effective, where each comparison produces a fairly good ratio value. Therefore, it can be stated that the financial performance of the X District Office is able to manage the budget appropriately and has carried out every activity program that has been determined.

Keywords: Financial Performance, Budget Realization Report, Value for Money, Financial Ratios

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah salah satu daftar untuk memenuhi kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dengan laporan keuangan tersebut dapat mengetahui keadaan keuangan pemerintah. Kasmir (2019) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan suatu data berisi penjelasan keuangan dalam setiap periode suatu lembaga atau perusahaan. Penyajian suatu laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah harus memuat komponen-

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec. Kembaran,
Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah 53182

e-ISSN : 2807-8969

komponen laporan keuangan perlu memuat beberapa komponen penting, salah satunya adalah laporan realisasi anggaran. (Dinanty et al., 2023).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan alat penting untuk menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan mengelola data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar lainnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berfungsi sebagai bantuan pengambilan keputusan bagi pengguna informasi keuangan. (Jannah & Daulay, 2024).

Organisasi pemerintah mempunyai ciri yang berbeda dengan organisasi lainnya, hal tersebut membuat organisasi pemerintah lebih dominan sebagai lembaga publik daripada lembaga ekonomi. (Wulandari et al., 2024). Kantor kecamatan adalah organisasi yang termasuk kedalam sektor publik yang tujuan pelaporan keuangannya adalah menerangkan data relevan dengan pengambilan kebijakan. Selain itu, sebagai organisasi publik juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk menilai bahwa telah memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan operasional suatu organisasi publik dengan pengukuran kinerja. (Dinanty et al., 2023).

Dalam organisasi perlu melakukan pengukuran/evaluasi kinerja secara berkala. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses evaluasi efektivitas berbagai kegiatan secara berkala. (Sutama et al., 2022). Pengukuran kinerja dinilai penting dalam menilai tanggung jawab suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana uang masyarakat dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. (Tikupasang et al., 2023).

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan baik yakni memenuhi konsep value for money (ekonomis, efisien dan efektif) dapat meningkatkan kemajuan ekonomi dan mampu mandiri mengelola suatu daerah. (Matulatuwa et al., 2024). Konsep value for money merupakan prinsip manajemen organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga indikator utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapai value for money dalam organisasi sektor publik, harus menggunakan biaya input yang paling rendah untuk mencapai output yang optimal guna mencapai tujuan organisasi. (Hasanah & Taufik Hidayat, 2023).

Rasio keuangan melibatkan perbandingan angka-angka dengan membagi satu dengan yang lainnya. Alat pengukuran yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan yang ditetapkan dan dilaksanakan yang dituangkan dalam APBD. (Fedwiriansyah et al., 2024). Alat ukur rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan terdapat empat indikator yaitu derajat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD, dan rasio belanja modal.

METODE PENELITIAN

Penyelesaian laporan ini dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan pemerintah sektor publik melalui laporan realisasi anggaran dengan metode deskriptif kuantitatif, dimana penyelesaian dilakukan dalam bentuk angka-angka dan analisisnya dilakukan dalam bentuk statistik. Laporan ini menggunakan data sekunder yang artinya dilakukan dengan menganalisis data yang berupa dokumen. Data tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Kecamatan Baturraden yang diperoleh melalui sub bagian perencanaan dan keuangan kecamatan. Analisis data dilakukan dengan perhitungan menggunakan dua metode yaitu:

1. Konsep Value for Money

Terdapat tiga indikator yang terdiri dari:

a. Rasio Ekonomis Belanja

Untuk mengukur rasio ekonomis belanja dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

Adapun presentase kriteria penilaian rasio ekonomis sebagai berikut:

Presentase Rasio Ekonomis	Kriteria Rasio Ekonomis
Lebih dari 100% (>100%)	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60% (<60%)	Tidak Ekonomis

Gambar 1 - Presentase Kriteria Rasio Ekonomis

b. Rasio Efisiensi Belanja

Untuk mengukur rasio efisiensi belanja dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100$$

Adapun presentase kriteria penilaian rasio efisiensi sebagai berikut:

Presentase Rasio Efisiensi	Kriteria Rasio Efisiensi
Lebih dari 100% (>100%)	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60% (<60%)	Sangat Efisien

Gambar 2 - Presentase Kriteria Rasio Efisiensi

c. Rasio Efektivitas Belanja

Untuk mengukur rasio efektivitas belanja dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Adapun presentase kriteria penilaian rasio efektivitas sebagai berikut:

Presentase Rasio Efektivitas	Kriteria Rasio Efektivitas
Lebih dari 100% (>100%)	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60% (<60%)	Tidak Efektif

Gambar 3 - Presentase Kriteria Rasio Efektivitas

2. Rasio Keuangan

Terdapat empat indikator yang terdiri dari:

a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan ukuran kemampuan keuangan

pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Undang-undang tersebut merupakan revisi dari UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 mengubah implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan mengarahkannya kepada pencapaian program prioritas pembangunan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. UU HKPD juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan kualitas belanja daerah. Untuk Mengukur DDF dihitung dengan cara:

$$DDF = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun } t}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } t}$$

Adapun presentase kriteria penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebagai berikut:

Presentasi Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
Lebih dari 50% (>50%)	Sangat Baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Sedang
20%-30%	Cukup Baik
10%-20%	Kurang
0%-10%	Sangat Kurang

Gambar 4 - Presentase Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

b. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (TKKD)

Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan seberapa besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara:

$$TKKD = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Transfer Tahun } t}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } t}$$

Adapun presentase kriteria penilaian tingkat ketergantungan keuangan daerah sebagai berikut:

Presentase Ketergantungan keuangan Daerah	Kriteria Ketergantungan keuangan Daerah
75%-100%	Kemampuan Keuangan Tinggi
50%-75%	Kemampuan Keuangan Sedang
25%-50%	Kemampuan Keuangan Rendah
0%-25%	Kemampuan Keuangan Sangat Rendah

Gambar 5 - Presentase Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

c. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas PAD merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Untuk mengukur

efektivitas PAD dihitung dengan cara:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD Tahun } t}{\text{Total Anggaran PAD Tahun } t}$$

Adapun presentase kriteria penilaian efektivitas PAD sebagai berikut:

Presentase Efektivitas PAD	Kriteria Efektivitas PAD
Lebih dari 100% (>100%)	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75% (<75%)	Tidak Efektif

Gambar 6 - Presentase Kriteria Efektivitas PAD

d. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal adalah perbandingan realisasi belanja modal dengan total yang dibelanjakan. Pengukuran ini memberikan informasi mengenai proporsi belanja yang dilakukan oleh daerah. Belanja modal bersifat jangka menengah hingga jangka panjang. Belanja modal biasanya memiliki kisaran 5-20%. Untuk rasio belanja modal belum ada patokan yang pasti berapa besarnya yang ideal. Berada di daerah yang termasuk ke dalam negara berkembang pemerintah daerah mempunyai peran penting untuk meningkatkan pembangunan. Maka dari itu, rasio belanja modal yang kecil perlu ditingkatkan untuk membangun daerah menjadi lebih baik. Untuk menghitung rasio belanja modal dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal Tahun } t}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah Tahun } t}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan *Value for Money*

Table 1 - Perhitungan Rasio Ekonomis Kantor Kecamatan X Periode 2021-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rasio Ekonomis	Kriteria
2021	Rp 2.095.423.819	Rp 1.963.892.474	94%	Ekonomis
2022	Rp 2.407.191.991	Rp 2.326.982.544	97%	Ekonomis
2023	Rp 2.817.449.193	Rp 2.770.683.095	98%	Ekonomis

Menurut analisis Laporan Realisasi Anggaran, menggunakan perhitungan konsep *value for money* didapatkan perbandingan rasio ekonomis pada tahun 2021 terealisasi belanja sebesar Rp 1.963.892.474 dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.095.423.819 dengan hasil rasio sebesar 94% meningkat di tahun 2022 terealisasi belanja sebesar Rp 2.326.982.544 dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.407.191.991 dengan hasil rasio 97%, lalu pada tahun 2023 terealisasi belanja sebesar Rp 2.770.683.095 dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.817.449.193 dengan hasil rasio ekonomis sebesar 98%. Selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan tingkat rasio yang dikategorikan ekonomis.

Table 2 - Perhitungan Rasio Efisiensi Kantor Kecamatan X Periode 2021-2023

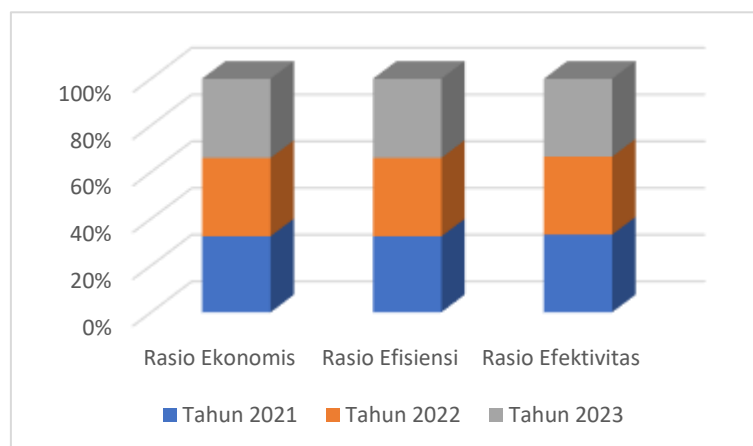
Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2021	Rp 2.095.423.819	Rp 1.963.892.474	94%	Kurang Efisien
2022	Rp 2.407.191.991	Rp 2.326.982.544	97%	Kurang Efisien
2023	Rp 2.817.449.193	Rp 2.770.683.095	98%	Kurang Efisien

Perbandingan rasio efisiensi dari tahun 2021-2023 dikategorikan kurang efisien dan juga mengalami penurunan tingkat rasio yaitu pada tahun 2021 terealisasi belanja sebesar Rp 1.963.892.474 dari target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.095.423.819 dengan hasil rasio sebesar 94% mengalami penurunan di tahun 2022 terealisasi belanja sebesar Rp 2.326.982.544 dari target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.407.191.991 dengan hasil rasio 97%, lalu pada tahun 2023 terealisasi belanja sebesar Rp 2.770.683.095 dari target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.817.449.193 dengan hasil rasio efisien sebesar 98%.

Table 3 - Perhitungan Rasio Efektivitas Kantor Kecamatan X Periode 2021-2023

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2021	Rp 2.095.423.819	Rp 2.095.423.819	100%	Efektif
2022	Rp 2.407.191.991	Rp 2.407.191.991	100%	Efektif
2023	Rp 2.817.449.193	Rp 2.817.449.193	100%	Efektif

Dari perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2021-2023 menghasilkan tingkat rasio 100% yang dimana dapat dikategorikan efektif. Tingkat rasio 100% dikarenakan anggaran belanja daerah yaitu pada Kecamatan X menyesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Pada tahun 2021 realisasi PAD dan anggaran PAD sebesar Rp 2.095.423.819. Tahun 2022 realisasi PAD dan anggaran PAD sebesar Rp 2.407.191.991. Lalu pada tahun 2023 realisasi PAD dan anggaran PAD sebesar Rp 2.817.449.193.



Gambar 7 - Grafik Value for Money

Perhitungan Rasio Keuangan

113

Table 4 - Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal
Kantor Kecamatan X Periode 2021-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	Rasio	Kriteria
2021	Rp 1.963.892.474	Rp 1.963.892.474	100%	Sangat Baik
2022	Rp 2.326.982.544	Rp 2.326.982.544	100%	Sangat Baik
2023	Rp 2.770.683.095	Rp 2.770.683.095	100%	Sangat Baik

Menurut analisis Laporan Realisasi Anggaran, menggunakan perhitungan rasio keuangan didapatkan derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2021-2023 menghasilkan tingkat rasio 100% yang dimana dapat dikategorikan sangat baik. Pada 2021 realisasi PAD dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.963.892.474. Pada tahun 2022 realisasi PAD dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.326.982.544. Kemudian pada tahun 2023 realisasi PAD dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.770.683.095.

Table 5 - Perhitungan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
Kantor Kecamatan X Periode 2021-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer	Rasio	Kriteria
2021	Rp 1.963.892.474	Rp 1.963.892.474	100%	Tinggi
2022	Rp 2.326.982.544	Rp 2.326.982.544	100%	Tinggi
2023	Rp 2.770.683.095	Rp 2.770.683.095	100%	Tinggi

Dari perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2021-2023 menghasilkan tingkat rasio 100% yang berarti dikategorikan kemampuan keuangan tinggi. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan transfer dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.963.892.474. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan transfer dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.326.982.544. Lalu pada tahun 2023 realisasi pendapatan transfer dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.770.683.095.

Table 6 - Perhitungan Efektivitas PAD
Kantor Kecamatan X Periode 2021-2023

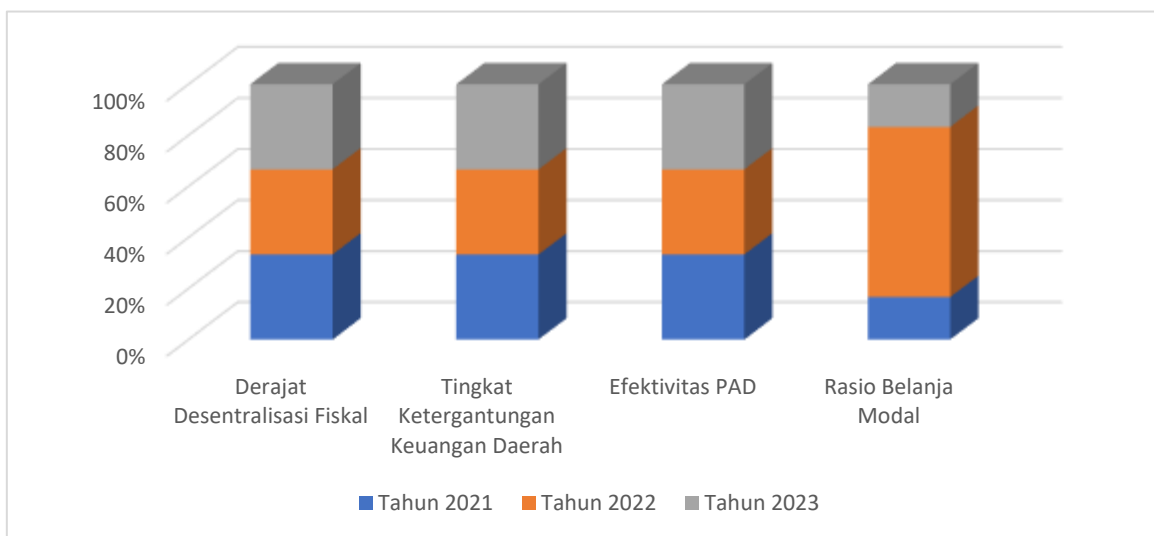
Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio	Kriteria
2021	Rp 2.095.423.819	Rp 2.095.423.819	100%	Efektif
2022	Rp 2.407.191.991	Rp 2.407.191.991	100%	Efektif
2023	Rp 2.817.449.193	Rp 2.817.449.193	100%	Efektif

Kemudian menurut perhitungan efektivitas PAD pada tahun 2021-2023 menghasilkan tingkat rasio 100% yang dimana dapat dikategorikan efektif. Pada tahun 2021 realisasi PAD dan anggaran PAD sebesar Rp 2.095.423.819. Tahun 2022 realisasi PAD dan anggaran PAD sebesar Rp 2.407.191.991. Lalu pada tahun 2023 realisasi PAD dan anggaran PAD sebesar Rp 2.817.449.193.

Table 7 - Perhitungan Rasio Belanja Modal Kantor Kecamatan X Periode 2021-2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Belanja Modal	Rasio	Kriteria
2021	Rp 1.963.892.474	Rp 14.270.000	1%	Rendah
2022	Rp 2.326.982.544	Rp 84.597.900	4%	Rendah
2023	Rp 2.770.683.095	Rp 35.900.000	1%	Rendah

Perbandingan rasio belanja modal pada tahun 2021 terealisasi belanja modal sebesar Rp 14.270.000 dari realisasi belanja daerah sebesar Rp 1.963.892.474 dengan hasil rasio 1% dan pada tahun 2022 terealisasi belanja modal sebesar Rp 84.597.900 dari realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.326.982.544 dengan hasil rasio 4% yang dimana meningkat dibandingkan tahun 2021, meskipun masih dikategorikan rendah. Lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan tingkat rasio yaitu terealisasi belanja modal sebesar Rp 35.900.000 dari realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.770.683.095 dengan hasil rasio 1%.



Gambar 1 - Grafik Rasio Keuangan

KESIMPULAN

Menurut analisis Laporan Realisasi Anggaran, kinerja keuangan di Kantor Kecamatan X selama tahun 2021 hingga 2023, rasio ekonomis menunjukkan peningkatan yang positif, dari 94% di tahun 2021 menjadi 98% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa belanja daerah semakin mendekati target anggaran, yang berarti semakin baik dalam mencapai target anggaran. Meskipun rasio ekonomis meningkat, rasio efisiensi menunjukkan penurunan dari 94% di tahun 2021 menjadi 98% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa pencapaian anggaran menurun secara konsisten, yang mungkin disebabkan oleh meningkatnya belanja. Rasio efektivitas tetap 100% dari tahun 2021 hingga 2023, yang menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah selalu disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, sehingga anggaran yang digunakan selalu efektif. Menurut derajat desentralisasi fiskal memperoleh rasio 100% yang berarti keuangan sudah dikelola dengan sangat baik, PAD sepenuhnya digunakan untuk pendanaan daerah. rasio belanja modal menunjukkan penurunan yang signifikan. Meskipun ada peningkatan dari 1% di tahun 2021 menjadi 4% di tahun 2022, rasio ini kembali menurun menjadi 1% di tahun

2023. Menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan dalam alokasi belanja modal yang seharusnya ditingkatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan proyek jangka panjang.

115

REFERENSI

- Dinanty, D. N., Ainiyah, N., Hartono, & Isnaini, N. F. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 173-183 e-ISSN: 2962-3987; p-ISSN: 2962-4428.
- Fedwiriansyah, N., Akbar, A., Anwar, Sahabuddin, R., & Haeruddin, M. I. M. (2024). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal El-Kahfi (Journal Of Islamic Economic)*, 5(1).
- Hasanah, I., & Taufik Hidayat, M. (2023). Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Surabaya Tahun 2017-2021). In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 3). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Jannah, R., & Daulay, A. N. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Camat Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 338–349.
- Matulatuwa, A., Th Pelamonia, J., Asrida, W., Akuntansi, J., & Negeri Ambon, P. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. *JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING (JAA)*, 3(1). <https://journal.isas.or.id/index.php/JAA>
- Sutama, I. N., Fatona, F., & Sudiyarti, N. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY (Studi di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat). *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 2(2), 193–200. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1020>
- Tikupasang, M., Haliah, & Kusumawati, A. (2023). PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS VALUE FOR Value For Money-Based Financial Performance Measurement At The North Toraja Regency. *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(3), 338–343.
- Wulandari, R., Iskandar, S., & Fausiah. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Makassar Periode 2020-2022. *Jurnal Manuhara*, 2(1), 80–99. <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Manuhara/article/view/436/427>